

PENGARUH KAPASITAS SDM, PEMANFAATAN TI DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Galuh Fajar Delanno

(Alumni Program Studi Akuntansi FE UNP, Email: galuhdelanno@gmail.com)

Deviani

(Program Studi Akuntansi FE UNP, Email : deviani_syafei@yahoo.com)

Abstract

The value of local government financial reporting information is influenced by several factors: the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance and the system of internal control. The writer wanted to know the effect those factors to the value of local government financial reporting information. testing hypothesis used primary data. The techniques analysis of data used path analysis with the system of internal control, the capacity of human resources, the utilization of information technology and the control of regional finance as exogenous variable . The research found that the capacity of human resources, the utilization of the information technology, the control of regional finance and the system of internal have a significantly give positive influence to the value of local government financial reporting information.. It is recommended to the local government to do a review about the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance and the system of internal control to make financial reporting so it has information value.

Keywords: *information value, the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance, the system of internal control.*

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas kepeng-urusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik

kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Menurut Wahyono (2004) informasi harus dapat di-pahami sebagai salah satu indikator ber-kualitasnya suatu informasi. Mudah di-pahami disini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini ke-mampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan in-formasi yang bernilai (dapat dipahami).

Hal kedua yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Jogiyanto, 1995 (dalam Harifan, 2009) menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. In-formasi merupakan produk dari sistem tek-nologi informasi yang berperan dalam me-nyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organi-sasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Hal ketiga yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Sistem akan berjalan baik apabila ada peng-awasan yang memastikan sistem berjalan se-suai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu peng-awasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011).

Hal terakhir yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan

keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Sistem akuntansi memerlukan pengendalian internal atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian internal organisasi (Mahmudi, 2007). Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pen-cegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya orga-nisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian in-ternal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008).

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil pemerik-saan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2008 sampai Tahun Anggaran 2010 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait dengan sangat rendahnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan lain dari beberapa SKPD di Kota Padang yaitu pegawai pada bagian akuntansi/keuangan masih ada yang tidak tamatan akuntansi. Disamping itu, sarana TI berupa komputer masih kurang dari segi jumlah dan kualitas. Pengawasan keuangan daerah yang lemah dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan per-undang-undangan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki nilai informasi untuk dapat men-dukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Nilai informasi dari suatu laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai in-formasi tersebut.

Faktor-faktor ini terdiri dari kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal.

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah-an (SAP) (2005:56) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Suwardjono (2004:101) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara.

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005).

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di-verifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Ukuran kapasitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Griffin, 2004 dalam Wahyuni, 2011) yaitu:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapan pun didunia terdapat pendidikan.

b. Pelatihan

Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya.

c. Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan memiliki pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan sesuatu pekerjaan, lebih terampil, punya wawasan yang luas dan mudah beradaptasi dengan lingkungan.

2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010) :

a. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan

b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melak-sanakan tugas
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan in-formasi yang dibutuhkan
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial di-hasilkan dari sistem yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

2.4 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2011) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentu-kan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang di-perlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

Yani (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pe-laksanaannya :

- 1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,

- 3) Struktur APBD,
- 4) Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD,
- 5) Penyusunan dan penetapan APBD,
- 6) Pelaksanaan dan perubahan APBD,
- 7) Penatausahaan keuangan daerah,
- 8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,
- 9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
- 10) Pengelolaan kas umum negara,
- 11) Pengelolaan piutang daerah,
- 12) Pengelolaan investasi daerah,
- 13) Pengelolaan barang milik negara,
- 14) Pengelolaandana cadangan,
- 15) Pengelolaan utang daerah,
- 16) Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
- 17) Penyelesaian kerugian daerah,
- 18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

2.5 Sistem Pengendalian Internal

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan per-undang-undangan.

Aren (2008), lima komponen Pengendalian Internal:

a. Lingkungan Pengendalian

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen

untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.

c. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk yang termasuk dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas.

d. Informasi dan Komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, mem-proses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas serta mempertahankan akuntabilitas untuk aktiva yang terkait.

e. Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian berkala atau ber-kelanjutan dari mutu penampilan/pres-tasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi seperti yang di-harapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Tuasikal (2007) tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Secara simultan dan parsial variabel independen berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Alat analisis adalah analisis faktor.

Penelitian Indriasari (2008) tentang pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan SPI terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan TI dan SPI berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sedangkan kapasitas SDM tidak memiliki pengaruh. Alat analisis adalah analisis faktor.

Penelitian Harifan (2009) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD kota Padang. Kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan pengendalian in-tern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemda. Alat analisis yaitu regresi berganda.

Penelitian Fikri (2011) tentang pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada instansi pemerintah kota Padang. SIKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan, pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemda melalui SIKD. Alat analisis yaitu analisis jalur.

2.7 Kerangka Konseptual

1. Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan

standar yang ditetapkan pemerintah. Pengendalian dalam aktivitas pemerintah akan mendorong pemakaian sumber daya, mencakup personil, secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan.

2. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*.

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

3. Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal.

4. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Internal terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan

keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Salah satu unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal adalah penilaian risiko serta informasi dan komunikasi. Dalam penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen yang mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Ins-tansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Jadi semakin baik penerapan sistem pengendalian internal akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang didapatkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1

2.8 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah:

- H₁ :Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang
- H₂ :Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang
- H₃ :Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang
- H₄ :Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang berjumlah 45 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kan-tor, Kecamatan, dan Inspektorat. Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staf akuntansi pada SKPD. Alasan pemilihan responden adalah karena kepala bagian dan staf akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian ter-sebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi. jumlah responden 90 Responden.

3.3 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada po-pulasi dalam penelitian ini.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel antara lain:

1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Variabel Eksogen dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1)

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)

c. Pengawasan Keuangan Daerah (X_3)

3. Variabel Intervening dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal (X_4).

3.5 Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, ter-lebih dahulu dilakukan uji pendahuluan ter-hadap kuesioner. Untuk uji validitas, maka digunakan rumus korelasi *Product Moment*, sebagai berikut:

$r_{xy} =$

$$\frac{N(\sum XY) - (\sum Y)(\sum X)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi

n = Besar sampel

x = Variabel Bebas (X_1, X_2)

y = Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang

Dari *print out* SPSS versi 16.0 dapat dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilai $r_{hitung} <$ dari r_{tabel} , maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r_{hitung} yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum ob^2}{\sigma^2 t} \right]$$

Dimana:

- r = Reliabilitas Instrumen
- k = Banyak butir pertanyaan
- $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir
- $\sigma^2 t$ = Varian total

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* menurut Sekaran (2003:205) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b. 0,6 – 0,7 akseptabel
- c. 0,7 – 0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

3.7 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig \geq 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal.
- b. Jika nilai Sig $<$ 0,05 maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian data sama atau berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan metode *Spearman Correlations*. Apabila nilai koefisien korelasi spearman $>$ 0,05, dan nilai signifikansinya $<$ 0,05 berarti varian data untuk semua variabel adalah homogen, atau varian data populasi dari semua data sampel yang diambil homogen.

3.8 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah se-bagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

- 1) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan
- 2) Mengitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus:

$$\frac{5SS+4S+3R+2TS+1STS}{15}$$

Dimana:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- R = Ragu-ragu
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

- 3) Menghitung nilai rerata jawaban responden.

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n xi}{n}$$

Keterangan :

- Xi = Skor total
- N = Jumlah responden

- 4) Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel.

Dengan rumus:

$$TCR = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Keterangan :

TCR= Tingkat capaian responden

R_s = Rata-rata skor jawaban

n = Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

(a) Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik

(b) Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik

(c) Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik

2. Pengujian Model

Untuk dapat menganalisis seberapa besar suatu variabel penyebab mempengaruhi variabel akibat maka analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Diagram jalur merupakan sebuah struktur yang lengkap dari hubungan kausal antar variabel, yang terdiri dari hubungan substruktur yang menyerupai struktur regresi.

Struktur diagram jalur pada penelitian ini dapat dipecah menjadi 2 sub struktur:

a. Sub struktur 1 pengaruh tidak langsung

Dengan persamaan jalur sebagai berikut:

$$X_4 = P_{X_4X_1}X_1 + P_{X_4X_2}X_2 + P_{X_4X_3}X_3 + P_{X_4\epsilon}$$

b. Sub struktur 2 pengaruh langsung

Dengan persamaan jalur sebagai berikut:

$$Y = P_{YX_1}X_1 + P_{YX_2}X_2 + P_{YX_3}X_3 + P_{YX_4}X_4 + P_{Y\epsilon}$$

Maka berdasarkan sub struktur ini, besarnya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien jalur dengan simbol:

$$P_{YX_2} = b_{YX_2} = \frac{\sqrt{\sum_{h=1}^n X_{ih}^2}}{\sqrt{\sum_{h=1}^n Y_h^2}} ; i = 1, 2,$$

dan 3

Keterangan:

P_{YX_i} =koefisien jalur variabel X_i terhadap Y

b_{YX_i} =koefisien regresi variabel X_i terhadap Y

Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel lain (ϵ) dapat ditentukan dengan rumus :

$$P_{Y\epsilon} = \sqrt{1 - R_{YX_1X_2}^2}$$

Adapun pengaruh suatu variabel secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Pengaruh langsung

$X_1 \rightarrow Y$
Persamaan $P_{YX_1} \cdot P_{YX_1}$

$X_2 \rightarrow Y$
Persamaan $P_{YX_2} \cdot P_{YX_2}$

$X_3 \rightarrow Y$
Persamaan $P_{YX_3} \cdot P_{YX_3}$

$X_4 \rightarrow Y$
Persamaan $P_{YX_4} \cdot P_{YX_4}$

2) Pengaruh tidak langsung

$X_1 \rightarrow Y$ melalui $X_4 \rightarrow$
Persamaan $P_{YX_1} \cdot P_{X_4X_1} \cdot P_{YX_4}$

$X_2 \rightarrow Y$ melalui $X_4 \rightarrow$
Persamaan $P_{YX_2} \cdot P_{X_4X_2} \cdot P_{YX_4}$

$X_3 \rightarrow Y$ melalui $X_4 \rightarrow$
Persamaan $P_{YX_3} \cdot P_{X_4X_3} \cdot P_{YX_4}$

3.9 Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis jalur modelnya sudah *fit* atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel endogen dan variabel eksogen secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai *sig* yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah *fit*. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

(Gujarati, 1999:120)

Keterangan:

F = Uji F

R^2 = Koefisien determinan

- k = Jumlah variabel bebas
n = Jumlah Sampel

3.10. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien deter-minasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang ter-cakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada dalam model. Hal ini dapat di-lakukan dengan menggunakan *adjusted R²* yaitu:

$$AdjustedR^2 = 1 - (1 - R^2) \left[\frac{N - 1}{N - k} \right]$$

Dari rumus di atas jelas bahwa:

- 1) Kalau $k > 1$ maka *adjusted R²* < R^2 , yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, *adjusted R²* dan R^2 akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan *adjusted R²* lebih kecil daripada R^2 .
- 2) *Adjusted R²* dapat positif atau negatif, walaupun R^2 selalu non negatif. Jika *adjusted R²* negatif nilainya dianggap 0.

3.11 Uji Hipotesis (t-Test)

Pengujian ini bertujuan untuk menge-tahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel ter-ikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, maka digunakan *t-Test* dengan rumus :

$$t - Test = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$

keterangan:

t = Nilai mutlak untuk pengujian

β_n = Koefisien regresi masing-masing variabel

S β_n = Standar error masing-masing variabel

Dengan kriteria pengujian :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak.

Selain kriteria tersebut, untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dan koefisien positif dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat signifikansi < 0,05 berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apa-bila tingkat signifikansi > 0,05 berarti H_a di-tolak dan H_0 diterima.

3.12 Definisi Operasional

1. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai informasi pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat di-bandingkan dengan periode-periode se-belumnya.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tang-gung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pen-deteksian penggelapan (*fraud*).

4. HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Sampel dan Responden Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah empat puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Setiap sampel masing-masing terdiri dari dua responden. Dari empat puluh lima sampel tersebut, disebarkan sebanyak 84 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 80 kuesioner. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 80 kuesioner.

Hanya 95,24% diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Kuesioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung dalam rentang waktu 12 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2012.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Dapat dilihat pada **Tabel 1**

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach's Alpha yang terdapat pada tabel 1 yaitu untuk instrumen kapasitas sumber daya manusia 0,783, pemanfaatan teknologi informasi 0,798, pengawasan keuangan daerah 0,727, dan sistem pengendalian internal 0,858. Sedangkan untuk instrumen nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah 0,869. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,70. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan Corrected Item-Total Colleration. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 80$, adalah **0,185**. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

Dari **Tabel 2** dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen kapasitas sumber daya manusia diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,310. Pemanfaatan teknologi informasi diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,306. Pengawasan keuangan daerah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,276. Sistem pengendalian internal diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,201. Dan, untuk nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai terkecil sebesar 0,340.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorof Smirnov (KS)*, dengan melihat perbandingan nilai signifikansi yang dihasilkan > 0.05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan < 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Dari **Tabel 3** terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,744 dengan signifikan 0,637. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah ber-distribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Homogenitas

Pengujian ini dilakukan dengan metode *Spearman Correlations*. Berdasarkan **Tabel 4** dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi spearman untuk masing-masing variabel X_1 (kapasitas sumber daya manusia), X_2 (pemanfaatan teknologi informasi), X_3 (pengawasan keuangan daerah), X_4 (sistem pengendalian internal) dan Y (nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah) $> \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa varian data untuk semua variabel adalah homogen, atau varian data populasi dari semua data sampel yang diambil homogen.

4.4 Uji Model

Untuk dapat menganalisis seberapa besar suatu variabel penyebab mempengaruhi variabel akibat maka analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Struktur diagram jalur dalam penelitian ini kemudian dipecah menjadi 2 sub struktur:

1. Sub struktur I

Sub struktur I dalam penelitian ini menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan

daerah terhadap sistem pengendalian internal. Sehingga dapat dilihat pengaruh tidak langsung kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal. Berikut hasil pengolahan data pada sub struktur I dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Dari pengujian dapat diketahui pengaruh variabel lain (Py_{e1}) adalah:

$$Py_{e1} = \sqrt{(1-0,537)} = 0,6804 = 68,04\%$$

Sehingga persamaan jalurnya adalah:

$$X_4 = 0,320X_1 + (-0,014X_2) + 0,497X_3 + 0,680$$

Dari **Tabel 6** terlihat bahwa variabel X_1 mempunyai tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$ dan variabel X_3 mempunyai tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien jalurnya signifikan dan model tersebut baik untuk diteliti. Sedangkan variabel X_2 mempunyai tingkat signifikansi $0,893 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien jalurnya tidak signifikan.

2. Sub struktur II

Sub struktur II dalam penelitian ini menguji pengaruh langsung kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berikut hasil pengolahan data pada sub struktur II dapat dilihat pada **Tabel 7**. Dari pengujian dapat diketahui pengaruh variabel lain (Py_{e2}) adalah:

$$Py_{e2} = \sqrt{(1-0,664)} = 0,5797 = 57,97\%$$

Sehingga persamaan jalurnya adalah:

$$Y = 0,247X_1 + 0,219X_2 + 0,313X_3 + 0,199X_4 + 0,5797$$

Dari **Tabel 8** terlihat bahwa variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 mempunyai tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa

koefisien jalur-nya signifikan dan model tersebut baik untuk diteliti.

4.5 Uji F (F-Test)

Dari **Tabel 9** hasil pemrosesan data menunjukkan hasil sebesar 37,104 yang signifikan pada 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi yaitu $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan jalur yang diperoleh dapat diandalkan atau model sudah *fit* sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian secara individual.

4.6 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian seperti terlihat pada **Tabel 10** menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,646. Hal ini berarti, kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah sebesar 64,6 %, sedangkan sisanya 35,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model penelitian ini.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dalam Penelitian

Pengaruh langsung dan tidak langsung variabel penyebab terhadap variabel akibat adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh Langsung

$$\begin{aligned}
 X_1 &\longrightarrow Y = (P_{YX1}) (P_{YX1}) \\
 &= (0,247) (0,247) \\
 &= 0,0610 = 6,10\% \\
 X_2 &\longrightarrow Y = (P_{YX2}) (P_{YX2}) \\
 &= (0,219) (0,219) \\
 &= 0,0479 = 4,79\% \\
 X_3 &\longrightarrow Y = (P_{YX3}) (P_{YX3}) \\
 &= (0,313) (0,313) \\
 &= 0,0979 = 9,79\% \\
 X_4 &\longrightarrow Y = (P_{YX4}) (P_{YX4}) \\
 &= (0,199) (0,199) \\
 &= 0,0396 = 3,96\%
 \end{aligned}$$

2) Pengaruh Tidak Langsung

$$\begin{aligned}
 X_1\Omega X_4 &\longrightarrow Y = (P_{YX1}) (P_{X4X1}) \\
 (P_{YX4}) & \\
 &= (0,247) (0,320) \\
 &(0,199) \\
 &= 0,0157 = 1,57\% \\
 X_2\Omega X_4 &\longrightarrow Y = (P_{YX2}) (P_{X4X2}) (P_{YX4})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (0,219) (-0,014) \\
 (0,199) & \\
 &= -0,0006 = -0,06\% \\
 X_3\Omega X_4 &\longrightarrow \epsilon_2=0,5797 \quad x_4x_3) \\
 (P_{YX4}) & \\
 &= (0,313) (0,497) \\
 (0,199) & \\
 &= 0,0309 = 3,09\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil pengolahan data diatas dapat diringkas sebagaimana tertera pada **Tabel 11**. Tabel 11, ringkasan rekapitulasi dapat dilihat bahwa pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pe-laporan keuangan pemerintah daerah secara langsung adalah 6,10%. Pengaruh peman-faatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara langsung adalah 4,79%. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara langsung adalah 9,79%. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap nilai informasi pelaporan ke-uangan pemerintah daerah secara langsung adalah 3,96%.

Sedangkan pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai in-formasi pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal adalah 1,57%. Dan pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pe-laporan keuangan pemerintah daerah me-lalui sistem pengendalian internal adalah 3,09%. Variabel intervening meningkatkan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen sebesar 4,66%.

Jadi total pengaruh langsung dan tidak langsung dalam penelitian ini adalah 29,3% sedangkan sisanya 57,97% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.

4.7 Pengujian Hipotesis

a) Pengujian hipotesis 1

Dari Tabel 8, sub struktur 2 dapat dilihat bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,357 > 1,665$ dengan nilai

signifikansi $0,021 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan kesimpulannya **hipotesis 1 diterima**.

b) Pengujian hipotesis 2

Dari Tabel 8, sub struktur 2 dapat dilihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,469 > 1,665$ dengan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan kesimpulannya **hipotesis 2 diterima**.

c) Pengujian hipotesis 3

Dari Tabel 8, sub struktur 2 dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,153 > 1,665$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan kesimpulannya **hipotesis 3 diterima**.

d) Pengujian hipotesis 4

Dari Tabel 8, sub struktur 2 dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,027 > 1,665$ dengan nilai signifikansi $0,046 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (X_4) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan kesimpulannya **hipotesis 4 diterima**.

4.8 Pembahasan

1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjuk-

kan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kapasitas sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara kapasitas sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka nilai informasi dari pelaporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Wahyono (2004:12), informasi harus dapat dipahami sebagai salah satu indikator ber-kualitasnya suatu informasi. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang ber-nilai (dapat dipahami). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Harifan (2009), menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ukuran kapasitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang sudah berpengalaman di suatu bidang pada SKPD dapat mengurangi kesalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Pengalaman merupakan salah satu indikator dalam menentukan kemampuan sumber daya manusia. Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan memiliki pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan sesuatu pekerjaan, lebih terampil, punya wawasan yang luas dan mudah beradaptasi dengan ling-

kungan. Pengalaman tidak hanya diukur dari tingkat pendidikannya saja, pengalaman juga memberikan kontribusi yang cukup terhadap kemampuan se-seorang dalam menangani sebuah pekerjaan.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan aparat pemerintah kota Padang sudah baik. Namun masih harus dilakukannya peningkatan untuk kedepannya agar lebih baik lagi.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka nilai informasi dari pelaporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Jogiyanto, 1995 (dalam Harifan, 2009), menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Indriasari (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang

dibutuhkan (se-perti, jaringan dan *software*).

Hal ini menunjukkan bahwa SKPD di dalam mengolah data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada SKPD Kota Padang sudah berjalan dengan baik.

3. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin baik pengawasan keuangan daerah maka nilai informasi dari pelaporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam

pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fikri (2011), pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam menyusun APBD ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu salah satunya perencanaan daerah. Jika dalam menyusun APBD tidak memperhatikan perencanaan daerah maka anggaran yang akan digunakan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah pada SKPD Kota Padang sudah berjalan dengan baik.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara sistem pengendalian internal dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin baik sistem pengendalian internal maka nilai informasi dari pelaporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian internal atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian internal organisasi (Mahmudi, 2007). Pengendalian internal merupakan suatu

cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370).

Pengendalian internal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari (2008), Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa, dalam rangka pelaksanaan penggunaan anggaran telah ditetapkan pemisahan tugas. Ini mendorong personil melakukan kecurangan karena tujuan dibuatnya sistem pengendalian internal yaitu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pengendalian internal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian

internal pada SKPD Kota Padang sudah berjalan dengan baik.

5. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Tidak Langsung Melalui Sistem Pengendalian Internal

Dari hasil pengolahan data disimpulkan, kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan teori Arens (2003), kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan yang memiliki nilai informasi dapat dirancang melalui suatu sistem pengendalian internal dengan tujuan umumnya adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam organisasi akan mendorong pemakaian sumber daya, mencakup personil, secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran organisasi. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan.

Dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, manajemen organisasi harus dapat melihat kompetensi yang dimiliki pegawai. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai akan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. SKPD di dalam menghasilkan laporan keuangan yang memiliki nilai informasi memerlukan pegawai yang mengerti dan paham standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Kemampuan sumber daya manusia dapat dilihat dari pen-

didikannya yaitu latar belakang pendidikan, pelatihan yang diikuti serta pengalaman yang dimiliki. Selain itu, pimpinan SKPD harus dapat menetapkan arah kebijakan menyangkut sumber daya manusia atau personil yang dimiliki. Kebijakan tersebut dapat berupa mempekerjakan, melatih, mengevaluasi, mempromosikan dan mengkompensasikan karyawan serta memberikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

6. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Tidak Langsung Melalui Sistem Pengendalian Internal

Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara tidak langsung melalui sistem pengendalian internal. Hal ini sangat bertentangan dengan teori Arens (2003), pemanfaatan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data sehingga teknologi informasi dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dari informasi. Peningkatan kepengendalian internal sebagai hasil pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi yaitu kendali komputer menggantikan kendali manual. Satu keuntungan teknologi informasi adalah kemampuan untuk meningkatkan pengendalian internal dengan menggabungkan kendali yang dilakukan komputer dalam aktivitas proses transaksi sehari-hari.

Penelitian ini sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, dimana pada

se-tiap SKPD telah memiliki teknologi informasi baik berupa *hardware* (komputer dan laptop) maupun *software* (SAKD). Tapi, yang menjadi permasalahannya yaitu personil atau pengguna teknologi informasi itu sendiri yang tidak memanfaatkan dengan efektif dan efisien. Penggunaan komputer yang tidak untuk kepentingan kantor dan personil yang tidak mengerti cara penggunaan *software* SAKD.

7. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Tidak Langsung Melalui Sistem Pengendalian Internal

Dari hasil pengolahan data disimpulkan, pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan teori Arens (2003), pengawasan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Dimana, pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa

pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk pengawasan dalam sistem pengendalian internal yaitu adanya pemeriksaan mendadak oleh pimpinan, baik pimpinan SKPD maupun pimpinan daerah terhadap kinerja bawahan agar laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai nilai informasi.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kota Padang. Di mana, semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kota Padang. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kota Padang. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula nilai

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kota Padang. Di mana, semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 29,3% sedangkan sisanya 57,97% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada nilai informasi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai nilai informasi.

Penelitian ini masih terbatas pada variabel yang diteliti. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan

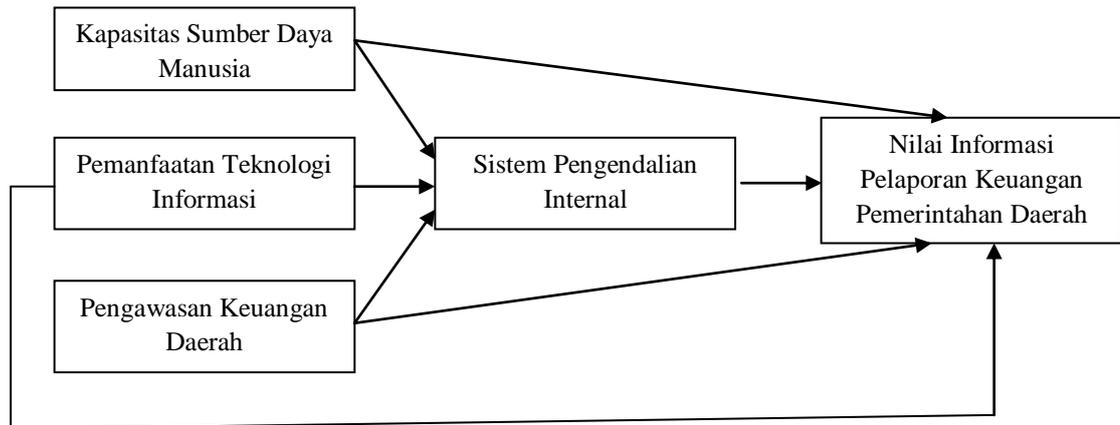
variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh. Keterbatasan pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, Randal J Elder & Mark S Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Guy, Dan M, C Wayne Alderman, Alan J Winters. 2003. *Auditing*. Jakarta: Erlangga
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF
- Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Lampiran



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Tabel 1. Uji Reliabilitas (Nilai Cronbach’s Alpha)

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach’s Alpha
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,869
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,783
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	0,798
Pengawasan Keuangan Daerah (X ₃)	0,727
Sistem Pengendalian Internal (X ₄)	0,858

Tabel 2 Uji Validitas (Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil)

Instrumen Variabel	Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,340
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,310
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	0,306
Pengawasan Keuangan Daerah (X ₃)	0,276
Sistem Pengendalian Internal (X ₄)	0,201

Tabel 3. Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.08577386
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.053
Kolmogorov-Smirnov Z		.744
Asymp. Sig. (2-tailed)		.637

a. Test distribution is Normal.

Tabel 4. Uji Homogenitas

			Correlations				
			Nilai Informasi	Kap. SDM	Pemanfaatan TI	Pengawasan Keu.daerah	SPI
Spearmans rho	Nilai Informasi	Correlation Coefficient	1.000	.674**	.566**	.680**	.639**
		Sig. (1-tailed)	.	.000	.000	.000	.000
		N	80	80	80	80	80
KapSDM	KapSDM	Correlation Coefficient	.674**	1.000	.535**	.572**	.561**
		Sig. (1-tailed)	.000	.	.000	.000	.000
		N	80	80	80	80	80
PemanfaatanTI	PemanfaatanTI	Correlation Coefficient	.566**	.535**	1.000	.385**	.301**
		Sig. (1-tailed)	.000	.000	.	.000	.003
		N	80	80	80	80	80
PengawasanKeuda	PengawasanKeuda	Correlation Coefficient	.680**	.572**	.385**	1.000	.678**
		Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.	.000
		N	80	80	80	80	80
SPI	SPI	Correlation Coefficient	.639**	.561**	.301**	.678**	1.000
		Sig. (1-tailed)	.000	.000	.003	.000	.
		N	80	80	80	80	80

Tabel 5. Uji Model Sub Struktur I

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.733 ^a	.537	.518	2.463	1.524

a. Predictors: (Constant), PengawasanKeu, PemanfaatanTI, KapSDM

b. Dependent Variable: SPI

Tabel 6. Koefisien Regresi Sub Struktur I

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.107	4.055		1.506	.136		
KapSDM	.402	.146	.320	2.744	.008	.448	2.231
PemanfaatanTI	-.016	.117	-.014	-.135	.893	.570	1.753
PengawasanKeu	.654	.133	.497	4.920	.000	.598	1.673

a. Dependent Variable: SPI

Tabel 7. Uji Model Sub Struktur II**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.664	.646	2.141	2.089

a. Predictors: (Constant), SPI, PemanfaatanTI, PengawasanKeu, KapSDM

b. Dependent Variable: NilaiInformasi

Tabel 8. Uji Regresi Sub Struktur II**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	680.114	4	170.029	37.104	.000 ^a
	Residual	343.686	75	4.582		
	Total	1023.800	79			

a. Predictors: (Constant), SPI, PemanfaatanTI, PengawasanKeu, KapSDM

b. Dependent Variable: NilaiInformasi

Tabel 9. Uji F Statistik**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.664	.646	2.141	2.089

a. Predictors: (Constant), SPI, PemanfaatanTI, PengawasanKeu, KapSDM

b. Dependent Variable: NilaiInformasi

Tabel 10. Koefisien determinasi**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.600	3.577		-.168	.867		
KapSDM	.314	.133	.247	2.357	.021	.408	2.452
PemanfaatanTI	.251	.102	.219	2.469	.016	.570	1.753
PengawasanKeu	.419	.133	.313	3.153	.002	.453	2.206
SPI	.202	.100	.199	2.027	.046	.463	2.158

a. Dependent Variable: NilaiInformasi

Tabel 11. Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data

No	Keterangan	Pengaruh (%)
1	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia (X_1) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y)	6,10
	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X_2) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y)	4,79
	Pengaruh pengawasan keuangan daerah (X_3) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y)	9,79
	Pengaruh sistem pengendalian internal (X_4) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y)	3,96
	Total Pengaruh Langsung	24,64
2	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia (X_1) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) melalui sistem pengendalian internal (X_4)	1,57
No	Keterangan	Pengaruh (%)
	Pengaruh pengawasan keuangan daerah (X_3) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) melalui sistem pengendalian internal (X_4)	3,09
	Total Pengaruh Tidak Langsung	4,66
3	Total Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung	29,3
4	Pengaruh variabel lain terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah	57,97
	Total	87,27

Halaman ini sengaja dikosongkan